

## REFERENSI

- Albrecht, W.S., dan Albrecht, C.O., 2003. *Fraud Examination*. South-Western, Thomson Learning, U.S.A.
- Asian Development Bank (ADB). 2010. Anti Korupsi dan Integritas. Diakses pada tanggal 20 September 2016. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/33272/files/anticorruption-and-integrity-id.pdf>.
- Astuti, A. dan Chariri, A. 2015. Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 4 nomor 3 tahun 2015. Halaman 1-12. ISSN: 2337-3806.
- Bogdan, R., dan S. Taylor. 1975. *Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological*. New York: John Wiley & Sons.
- BPKP RI. 2012. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- \_\_\_\_\_. 2016. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Januari 2016. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2016. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap%20Bul%20Hasil%20Pengawasan/LTL%2021%20%20bulan%20JanuariLapBulHPDIY\\_Jan\\_16.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap%20Bul%20Hasil%20Pengawasan/LTL%2021%20%20bulan%20JanuariLapBulHPDIY_Jan_16.pdf).
- Braun, V. dan Clarke, V. 2013. *Using Thematic Analysis in Psychology: Qualitative Research in Psychology*, 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887.
- Creswell, John. W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approaches*. Edisi Keempat. California: Sage Publications, Inc.
- Davis, Charles, R. Farrel, dan S. Ogilby. 2010. "Characterist and Skills of the Forensic Accountants." *Journal of Knowledge Management Volume 1, No. 2: Pages 34-47*.
- DiGabriele, James A. 2010. "An Empirical Investigation of The Relevant Skill of Forensic Accountant." AICPA, FVS Section.
- Hamzah, Andi,. 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.

- Hasan Bisri. 2011. Peran BPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaian Kerugian Negara. Makalah disampaikan dalam rakernas Mahkamah Agung, Jakarta, 19 September 2011.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications Ltd.
- Hopwood, W.S., Leiner, J.J., Young, G.R., 2008. *Forensic Accounting*. New York: McGraw Hill/Irwin Inc.
- Huber, W.D., 2014. Forensic Accounting: An Anglo-American Comparison-Forensic Accounting in the U.S.A. *Journal of Forensic & Investigative Accounting Vol. 6, Issue 3, Special International Issue*.
- Klitgard, David, 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mahkamah Agung. 2013. Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk.
- \_\_\_\_\_. 2013. Putusan Mahkamah Agung No: 29/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
- \_\_\_\_\_. 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.
- \_\_\_\_\_. 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.
- \_\_\_\_\_. 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.
- \_\_\_\_\_. 2015. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
- \_\_\_\_\_. 2015. Putusan Mahkamah Agung No: 05/Pid.Sus-TPK/2015/P.Tpkor.Yk.
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Prolaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mawakimbang, Hernold F. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

- \_\_\_\_\_. 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian. Yogyakarta: Thafa Media.*
- Manafe, A. L. 2016. Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/PID.SUS-TPK/2014/PN.Yyk. *Tesis Magister Akuntansi.* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Miles, M. B. dan Huberman, M. 2014. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rohidi).* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murwanto. R, A Budiarmo, dan F. H. Ramadhana. 2006. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah.*
- Ramamoorti, S., d. Morrison, dan J. W. Koletar. 2014. “*Bringing Freud To Fraud: Understanding The State-Of-Mind Of The C-Level Suite/White Collar Offender Through ‘A-B-C’ Analysis.* “ *Journal Of Forensic & Investigative Accounting Vol. 6 (Issue 1).*
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- \_\_\_\_\_. 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- \_\_\_\_\_. 2001. *Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.*
- \_\_\_\_\_. 2001. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- \_\_\_\_\_. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
- \_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- \_\_\_\_\_. 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan  
Pemeriksa Keuangan.
- \_\_\_\_\_. 2007. Surat Menteri Dalam Negeri No: 900/2677/SJ tanggal  
8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah
- \_\_\_\_\_. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang  
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman.
- \_\_\_\_\_. 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-  
X/2012.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang  
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Reyketeng, M. 2016. Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam  
Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul. *Tesis  
Magister Akuntansi*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Rezaee, Z., d. L. Crumbley, dan R. C. Elmore. 2006. “*Forensic accounting  
education: A survey of academicians and practitioners.*” *Journal of  
Forensic Accounting* Vol. 10 No. 3: PP, 48-59.
- Riadhussyah, M., 2014. *Peranan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara  
dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di  
Kota Mataram)*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Setiadi, Edi, dan Rena Yulia. 2010. *Tindak pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha  
Ilmu.
- Singleton, T.W., dan Singleton, A.J., 2010. *Fraud Auditing and Forensic  
Accounting*. Fourth Edition. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New  
Jersey.
- Soepardi, E. M. 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu  
Unsur Tindak Pidana Korupsi. Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah pada  
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Bandung:  
Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara:  
Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. 2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Edisi Kedua.  
Jakarta: Salemba Empat.

Williams, J. W. 2002. “*Playing the Corporate Shell Game: The Forensic Accounting and Investigations Industry, Law, and the Management of Organizational Appearances.*” Doctoral Dissertation, Toronto: York University. Dissertation Abstracts International.

Yin, Robert. K. 2014. *Case Study Research Design and Methods*. Edisi Kelima.  
California: Sage Publication, Inc.

Yuntho, E., Illian D. A. Sari, J. Limbong, R. R. Bakar, dan F. Ilyas. 2014. “*Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi.*” Jakarta: Indonesia Corruption Watch.